

KAJIAN PENGARUH PROGRAM NASIONAL UPAYA KHUSUS PENINGKATAN PRODUKSI PADI TERHADAP KEMISKINAN PERDESAAN DI WILAYAH BARAT DAN TIMUR INDONESIA

Estifania Krisnawati¹, Agus Suman², Putu Mahardika A. Saputra³

1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Indonesia
2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Indonesia
3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Indonesia

E-mail: estifania.krisnawati@gmail.com, agusuman@ub.ac.id, putu@ub.ac.id

Abstract

Increasing population in Indonesia spur increased demand for rice. On the other hand, national rice production as a rice-producing commodity is not optimal due to limited capital owned by farmers and the number of damaged irrigation infrastructures. This has an impact on the farmers' incomes that are less than optimal and the high poverty rate in rural areas requires public policy in the form of government expenditures, one of which is rolled out through the national program of Special Efforts (UPSUS) for Increasing Rice Production. This study aims to determine the effect of UPSUS funds directly or indirectly to rural poverty in the western and eastern regions of Indonesia. Using path analysis, the findings of the study indicate that the direct impact of the program on poverty is apparent in the eastern region with a positive coefficient. Meanwhile, the indirect effect of program funds on rural poverty through rice production and GDP of the food crops sub-sector shows positive values both in the west and east. As well as the indirect effect of program funds on poverty through rice production occurs only in the eastern region by showing negative coefficients.

Keywords: Government Expenditure, Rural Poverty, UPSUS PAJALE

JEL Classification: H5, Q180

1. PENDAHULUAN

Todaro & Smith (2011) berpendapat bahwa kebijakan dalam mengatasi kemiskinan seharusnya lebih diarahkan untuk membangun perdesaan pada umumnya dan sektor pertanian pada khususnya karena banyaknya jumlah orang miskin yang hidup di kawasan perdesaan. Sejalan dengan hal tersebut Mubyarto (1983) mengungkapkan bahwa pembangunan pertanian di Indonesia harus diartikan sebagai pembaruan penataan pertanian sebagai upaya mengatasi kemiskinan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang beruntung di perdesaan melalui maksimalisasi sumberdaya utama pembangunan pertanian.

Menurut Saputra (2014) dan Suman & Yustika (1996) dunia sedang dihadapkan pada tantangan global yang harus dihadapi setiap negara, dimana saat ini peran sektor manufaktur

semakin dominan, namun seharusnya tetap memperhatikan sektor pertanian karena sektor ini diyakini mampu mengatasi kemiskinan.

Berdasarkan data Divisi Kependudukan PBB, pada tahun 2017 Indonesia tercatat berada pada peringkat 4 (empat) negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,36 per tahun, menyebabkan kebutuhan akan beras sebagai bahan pangan pokok penduduk Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Di sisi lain produksi padi nasional sebagai komoditas penghasil beras belum optimal sebagai akibat keterbatasan permodalan yang dimiliki petani dan banyaknya prasarana jaringan irigasi yang mengalami kerusakan. Produksi yang kurang optimal menyebabkan pendapatan yang diterima juga rendah

sehingga menjadi penyebab mengapa petani selalu berada dalam lingkaran kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia didominasi oleh kemiskinan di daerah perdesaan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2015 menunjukkan bahwa penduduk miskin di perdesaan sebesar 14,21%, sedangkan di perkotaan sebesar 8,29% dari jumlah penduduk nasional.

Rumah tangga miskin di perdesaan didominasi penduduk dengan kepala rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian sebesar 60%. Pekerja sektor pertanian di Indonesia memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk dikategorikan sebagai pekerja miskin dibandingkan sektor lain karena kegiatannya masih banyak yang dilakukan secara tradisional (Pratomo, Saputra, & Shofwan, 2015). Hal ini menunjukkan sektor pertanian merupakan sektor yang sangat rentan terhadap resiko kemiskinan dibandingkan sektor lainnya. Peningkatan produktivitas sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani menjadi peran penting dalam mengatasi masalah kemiskinan. Intervensi sektor pertanian diklaim memiliki pengaruh serius terhadap pengurangan kemiskinan (Timmer, 2004). Dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan terutama di perdesaan, salah satu upaya pemerintah adalah melalui alokasi belanja bidang pertanian yang diharapkan mampu memacu produktivitas dan menurunkan kemiskinan.

Salah satu gebrakan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo pada bidang pertanian dalam rangka meningkatkan produksi padi nasional adalah program Upaya Khusus (UP-SUS) Peningkatan Produksi Padi yang merupakan bagian dari program nasional Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai (UP-SUS PAJALE) yang diluncurkan melalui Kementerian Pertanian pada 2015 dan ditargetkan tercapai pada 2017. Dengan dukungan anggaran dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pelaksanaan program nasional ini selain dapat memacu peningkatan produksi padi, diharapkan juga mampu mengatasi permasalahan kemiskinan yang dihadapi negara kita, terutama kemiskinan di perdesaan.

Keberhasilan pembangunan pertanian di Indonesia pada orde baru ditandai dengan tercapainya swasembada pangan nasional, di mana sebelumnya kita dikenal sebagai negara pengimpor beras. Pada masa itu tingkat kemiskinan di Indonesia menurun drastis, baik di perdesaan maupun perkotaan karena pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat dan adanya program pembangunan yang dilaksanakan secara terpadu. Pada era reformasi, pembangunan pertanian cenderung mengalami kemunduran, dan kemiskinan meningkat sebagai akibat krisis finansial asia pada 1997-1998. Kini pemerintah berupaya keras mengulang kembali keberhasilan pada masa orde baru dalam hal pembangunan pertanian.

Tabel 1. Produksi Padi Wilayah Barat dan Timur Indonesia Tahun 2015

Wilayah	Produksi Padi (Ribu Ton)
I. Barat	
- Jawa Timur	13.154
- Jawa Barat	11.373
- Jawa Tengah	11.301
- Kep Bangka Belitung	27
- Kep. Riau	0,96
- Rata-rata	3.636
II. Timur	
- Sulawesi Selatan	5.471
- NTB	2.417
- Kalimantan Selatan	2.140
- Maluku Utara	75
- Papua Barat	30
- Rata-rata	1.012

Ket : 3 provinsi dengan nilai tertinggi dan 2 nilai terendah di masing-masing wilayah.
 Sumber : BPS

Tabel 1 menunjukkan bahwa di wilayah barat, 3 (provinsi) dengan produksi padi tertinggi berada di pulau

Jawa. Sedangkan pada wilayah barat provinsi dengan produksi padi terbesar tersebar baik di pulau Sulawesi, Kalimantan maupun Nusa Tenggara. Produksi padi rata-rata di wilayah barat menunjukkan angka lebih tinggi dibandingkan wilayah timur.

Tabel 2. Kemiskinan Perdesaan Wilayah Barat dan Timur Indonesia Tahun 2015

Wilayah	Kemiskinan Perdesaan (%)
I. Barat	
- Aceh	19.56
- Bengkulu	16.71
- Jawa Timur	15.84
- Bangka Belitung	6.83
- Bali	6.42
- Rata-rata	11.88
II. Timur	
- Papua Barat	37.94
- Papua	37.34
- Maluku	26.70
- Kalimantan Tengah	6.02
- Kalimantan Selatan	5.06
- Rata-rata	16.73

Ket: 3 provinsi dengan nilai tertinggi dan 2 provinsi dengan nilai terendah di masing masing wilayah
 Sumber : BPS

Tabel 2 menunjukkan bahwa rata-rata kemiskinan perdesaan di wilayah timur jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah barat. Kemiskinan tertinggi di wilayah barat didominasi provinsi di Sumatra, sedangkan di wilayah timur 2 (dua) provinsi dengan kemiskinan tertinggi berada di Papua. Kemiskinan yang masih tinggi mengindikasikan perlunya campur tangan pemerintah untuk mengatasinya melalui pengeluaran atau belanjanya.

Banyak studi telah dilakukan untuk menyelidiki pengaruh belanja pemerintah di bidang pertanian terhadap kemiskinan. Studi yang dilakukan Fan, Jitsuchon, & Methakunnavut (2004); Omari & Muturi (2016), serta Udofia & Essang (2015) secara umum menunjukkan hasil bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor pertanian berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Hal tersebut yang men-

jadikan penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh program ini sebagai implementasi pengeluaran pemerintah secara nyata di sektor pertanian untuk dapat mengurangi tingkat kemiskinan terutama di perdesaan.

Studi dilakukan dengan mengelompokkan provinsi di seluruh nusantara kedalam 2 (dua) wilayah geografis yaitu wilayah barat dan timur Indonesia. Pengelompokan didasarkan atas potensi komoditas padi pada masing-masing wilayah, dimana wilayah barat merupakan wilayah dengan produksi padi tergolong tinggi, sedangkan wilayah timur adalah sebaliknya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui adanya perbedaan pengaruh pada masing-masing kelompok wilayah mengingat perbedaan kondisi geografis dan potensi komoditas padi di wilayah tersebut, sehingga menjadi menarik untuk diteliti agar pemerintah mengetahui apakah program ini dapat berpengaruh terhadap produksi padi dan kemiskinan perdesaan baik di wilayah barat maupun timur.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dana UPSUS Peningkatan Produksi Padi secara langsung maupun tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan perdesaan di wilayah barat dan timur Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian melalui pengeluarannya dituangkan dalam teori Keynes identitas keseimbangan pendapatan nasional $Y = C + I + G + X - M$. Pemerintah perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian agar tidak melemahkan kegiatan pihak swasta. Hubungan antara pengeluaran peme-

rintah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi telah lama diselidiki para ahli ekonomi publik semenjak mereka menyadari peran penting pengeluaran pemerintah.

Anggaran sektor pertanian memiliki pengaruh terhadap produksi pertanian, seperti halnya hasil studi Adofu, Abula, & Agama (2012) menunjukkan bahwa alokasi anggaran sektor pertanian dengan total produksi pertanian memiliki hubungan positif, dimana semakin besar belanja publik untuk sektor pertanian, semakin banyak perbaikan kinerja sektor pertanian, sehingga alokasi anggaran untuk pertanian memiliki berpengaruh besar terhadap hasil pertanian. Hasil serupa juga ditunjukkan Fan, Hazell, & Thorat (2000) dan Xu & Zhang (2011) dimana pengeluaran pemerintah di bidang pertanian berperan menghasilkan pertumbuhan produktivitas pertanian, yang berarti pertumbuhan pengeluaran pertanian publik merupakan prasyarat penting untuk meningkatkan produksi pertanian.

Bentuk hubungan negatif antara anggaran belanja pemerintah dengan kemiskinan ditunjukkan oleh ekonom aliran Keynesian. Upaya pengentasan kemiskinan sangat membutuhkan peran pemerintah, sesuai dengan peranannya yaitu peran alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Peran tersebut harus dilaksanakan dengan baik untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk kemiskinan dapat menjadi stimulus dalam menurunkan jumlah penduduk miskin. Udofia & Essang (2015) menunjukkan bahwa pengeluaran di sektor pertanian meningkatkan output pertanian, yang kemudian akan mengurangi tingkat kemiskinan (sebagaimana terbukti dalam hubungan antara output pertanian dan tingkat kemiskinan). Sementara itu Labintan (2010) menunjukkan bahwa kurangnya belanja pertanian menimbulkan

ketidakmampuan stok tanaman pangan, kekurangan sistem konservasi tanaman yang kemudian berdampak pada cepatnya peningkatan jumlah penduduk miskin.

Produksi pertanian sangat tergantung pada faktor produksi yang digunakan. Petani perlu memperhatikan efisiensi produksi untuk dapat meningkatkan pendapatannya untuk mencapai kesejahteraan yang diharapkan. Peningkatan produksi pertanian akan membawa peningkatan pada kesejahteraan petani, seperti halnya Jayadi (2012) menyatakan bahwa peningkatan output sektor pertanian akan meningkatkan kesejahteraan petani. Wahed (2015) juga menyimpulkan bahwa produksi usahatani memiliki hubungan positif terhadap kesejahteraan petani yang diproksi melalui Nilai Tukar Petani (NTP).

Kemiskinan pada sektor pertanian salah satunya disebabkan produktivitas yang rendah. Kunci penting produktivitas yang tinggi adalah pada penguasaan teknologi dan manajemen usahatani yang baik. Hubungan produktivitas pertanian dan kemiskinan ditunjukkan oleh studi yang pernah dilakukan Khan & Shah (2012), dimana peningkatan produktivitas yang diiringi dengan peningkatan produksi pertanian dapat menurunkan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan sebagai akibat peningkatan produktivitas dan produksi pertanian. Sejalan dengan hal tersebut, Tambunan (2009) menunjukkan bahwa pertumbuhan output (produktivitas) dan kenaikan tingkat upah merupakan jalur utama di mana kinerja pertanian dapat mempengaruhi kemiskinan.

Pada hubungan antara PDRB dan kemiskinan, Ponto, Kumenaung, & Wauran, (2015) menunjukkan bahwa adanya PDRB sektor pertanian yang rendah maka tingkat kemiskinan meningkat atau jika sektor pertanian tinggi maka kemiskinan akan menu-

run, sehingga satu-satunya cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup di sektor pertanian yaitu dengan meningkatkan produksi pertanian atau dengan meningkatkan harga yang diterima atas produk yang dihasilkan. Pertumbuhan output di sektor pertanian memiliki dampak yang lebih besar pada perubahan kemiskinan bila dibandingkan dengan sektor manufaktur (Tambunan, 2009).

Pembangunan pertanian diharapkan lebih dititikberatkan pada peningkatan kesejahteraan petani sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan terutama di perdesaan. Hubungan antara kesejahteraan petani dan kemiskinan ditunjukkan Jayadi (2012) yang menunjukkan bahwa provinsi dengan basis non pertanian membuktikan bahwa indeks NTP sebagai proksi kesejahteraan petani tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan dalam jangka pendek.

Penelitian ini akan menghasilkan kesimpulan apakah program nasional yang dicanangkan pemerintah sejak tahun 2015 ini dapat berpengaruh langsung terhadap kemiskinan perdesaan maupun melalui variabel produksi padi, PDRB subsektor tanaman pangan maupun kesejahteraan petani. Hipotesis yang dapat diajukan adalah :

- 1) Dana UPSUS Peningkatan Produksi Padi diduga memiliki pengaruh langsung yang positif dan signifikan terhadap produksi padi di wilayah barat dan timur Indonesia.
- 2) Dana UPSUS Peningkatan Produksi Padi diduga memiliki pengaruh langsung yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan perdesaan di wilayah barat dan timur Indonesia.
- 3) Produksi padi diduga memiliki pengaruh langsung yang positif dan signifikan terhadap kesejah-

teraan petani di wilayah barat dan timur Indonesia.

- 4) Produksi padi diduga memiliki pengaruh langsung yang positif dan signifikan terhadap PDRB sektor pertanian di wilayah barat dan timur Indonesia.
- 5) Produksi padi diduga memiliki pengaruh langsung yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan perdesaan di wilayah barat dan timur Indonesia.
- 6) Kesejahteraan petani diduga memiliki pengaruh langsung yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan perdesaan di wilayah barat dan timur Indonesia.
- 7) PDRB subsektor tanaman pangan diduga memiliki pengaruh langsung yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan perdesaan di wilayah barat dan timur Indonesia.
- 8) Dana UPSUS Peningkatan Produksi Padi diduga memiliki pengaruh secara tidak langsung yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan perdesaan melalui produksi padi di wilayah barat dan timur Indonesia.
- 9) Dana UPSUS Peningkatan Produksi Padi diduga memiliki pengaruh secara tidak langsung yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan perdesaan melalui produksi padi dan kesejahteraan petani
- 10) Dana UPSUS Peningkatan Produksi Padi diduga memiliki pengaruh tidak langsung yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan perdesaan melalui produksi padi dan PDRB subsektor tanaman pangan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Lokasi penelitian sebanyak 33 (tiga puluh tiga) provinsi di Indonesia, provinsi

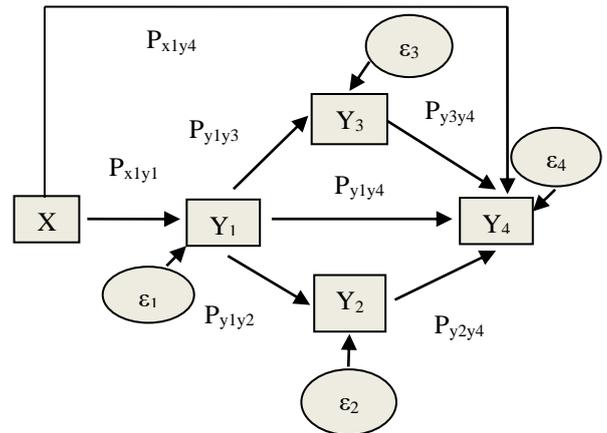
DKI Jakarta tidak menjadi lokasi penelitian karena sektor pertanian di provinsi tersebut tidak dominan dalam perekonomian. Data yang digunakan merupakan data tahun 2015 dan 2016. Penelitian ini membagi 2 (dua) kelompok wilayah yaitu 16 (enam belas) provinsi di wilayah barat (Sumatera, Jawa dan Bali) dan 17 (tujuh belas) provinsi di wilayah timur Indonesia (Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua). Pembagian tersebut didasarkan atas karakteristik potensi sektor pertanian tanaman pangan terutama padi.

Data diperoleh dari BPS, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Data yang digunakan untuk variabel bebas adalah belanja pemerintah sektor pertanian yaitu berupa dana UPSUS Peningkatan Produksi Padi pada 33 (tiga puluh tiga) Provinsi di Indonesia, sedangkan data variabel terikat adalah rasio penduduk miskin perdesaan, sedangkan variabel antara menggunakan data produksi padi, rasio PDRB subsektor tanaman pangan dan Nilai Tukar Petani (NTP).

Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan diagram jalur (path analysis) untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel dalam penelitian. Ketika regresi berganda tidak dapat menyelesaikan hubungan antar variabel yang kompleks, maka analisis jalur dapat digunakan (Gudono, 2012). Model hubungan antar variabel baik di wilayah barat maupun timur dapat digambarkan sebagai berikut.

Pengaruh langsung ditunjukkan oleh koefisien jalur (P) antara variabel bebas dan terikat. Sementara itu pengaruh tidak langsung diperoleh dari hasil kali pengaruh langsung antara variabel bebas terhadap variabel perantara dan pengaruh langsung antara

variabel perantara terhadap variabel bebas (Riduwan & Kuncoro, 2014).



Gambar 1. Diagram Analisis Jalur

Keterangan :

- X_1 : Dana UPSUS Peningkatan Produksi Padi
- Y_1 : Produksi Padi
- Y_2 : Kesejahteraan Petani
- Y_3 : PDRB Subsektor Tanaman Pangan
- Y_4 : Kemiskinan Perdesaan
- e : residual
- P : Koefisien jalur

Dari gambar 1, dapat dirumuskan persamaan substruktur sebagai berikut:

- 1) Substruktur 1 menyatakan pengaruh langsung dana UPSUS Padi (X_1) ke Produksi Padi (Y_1).

$$Y_1 = P_{x1y1} X_1 + \epsilon_1$$

- 2) Substruktur 2 menyatakan pengaruh langsung dari Produksi Padi (Y_1) ke Kesejahteraan Petani (Y_2)

$$Y_2 = P_{y1y2} Y_1 + \epsilon_2$$

- 3) Substruktur 3 menyatakan pengaruh langsung Produksi Padi (Y_1) ke PDRB Subsektor Tanaman Pangan (Y_3)

$$Y_3 = P_{y1y3} Y_1 + \epsilon_3$$

- 4) Substruktur 4 menyatakan pengaruh langsung UPSUS Padi (X_1), Produksi Padi (Y_1), Kesejahteraan Petani (Y_2) dan PDRB Subsektor

Tanaman Pangan (Y_3) ke Kemiskinan Perdesaan (Y_4)

$$Y_4 = P_{x_1y_4} X_1 + P_{y_1y_4} Y_1 + P_{y_2y_4} Y_2 + P_{y_3y_4} Y_3 + \varepsilon_4$$

- 5) Substruktur 5 menyatakan pengaruh tidak langsung UPSUS Padi (X_1) terhadap Kemiskinan Perdesaan (Y_4) melalui Produksi Padi (Y_1)

$$Y_4 = (P_{x_1y_1} X_1 \times P_{y_1y_4} Y_1) + \varepsilon_4$$

- 6) Substruktur 6 menyatakan pengaruh tidak langsung UPSUS Padi (X_1) terhadap Kemiskinan Perdesaan (Y_4) melalui Produksi Padi (Y_1) dan Kesejahteraan Petani (Y_2)

$$Y_4 = (P_{x_1y_1} X_1 \times P_{y_1y_2} Y_1 \times P_{y_2y_4} Y_2) + \varepsilon_4$$

- 7) Substruktur 7 menyatakan pengaruh tidak langsung UPSUS Padi (X_1) terhadap Kemiskinan Perdesaan (Y_4) melalui Produksi Padi (Y_1) dan PDRB Subsektor Tanaman Pangan (Y_3)

$$Y_4 = (P_{x_1y_1} X_1 \times P_{y_1y_2} Y_1 \times P_{y_3y_4} Y_3) + \varepsilon_4$$

Uji hipotesis dilakukan dengan melihat signifikansi pada uji t atau nilai sig (*p value*). Nilai uji t merujuk pada nilai *critical ratio* (CR) yang diperoleh dari hasil regresi. Berikut rumusan hipotesis:

H_0 = variabel independen secara signifikan tak memiliki pengaruh parsial terhadap dependen

H_1 = variabel independen secara signifikan memiliki pengaruh parsial terhadap dependen

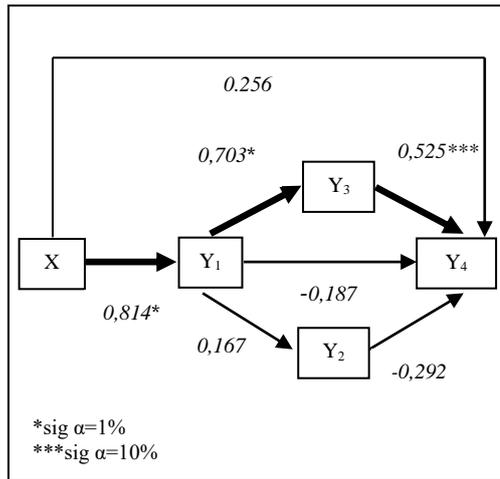
Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak H_1 diterima (maka ada pengaruh signifikan pada jalur terpilih) dan demikian sebaliknya. Atau dengan melihat nilai sig (*p value*). Jika nilai sig. (*p value*) $< \alpha$, H_0 ditolak H_1 diterima (maka ada pengaruh signifikan pada jalur terpilih) dan demikian pula sebaliknya (Sarwono, 2012).

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Data dianalisis menggunakan perangkat lunak SPSS 20. Sebelum dilakukan analisis jalur, dilakukan uji beda dan uji asumsi klasik. Uji beda dilakukan untuk mengetahui apakah pengelompokan provinsi di masing-masing wilayah berdasarkan kategori tingkat produksi padi memiliki rata-rata yang sama atau tidak secara statistik, sedangkan uji asumsi klasik yang dilakukan terdiri dari uji normalitas, heterokedastisitas dan multikolinearitas. Hasil uji beda dengan *independent sample t test* menunjukkan nilai signifikansi pada kedua wilayah $< 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak. Hal ini berarti rata-rata tingkat produksi padi di wilayah barat dan timur Indonesia tidak sama atau terdapat perbedaan rata-rata antara kedua kelompok wilayah.

Hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov (KS) menunjukkan probabilitas $> 0,01$ yang berarti residualnya terdistribusi normal. Uji heterokedastisitas menggunakan uji Glejser dengan signifikansi 1 %, dimana semua hasil uji t dari regresi absolut residual oleh variabel bebas menunjukkan nilai $> 0,01$ yang artinya tidak terjadi heterokedastisitas. Yang terakhir uji multikolinearitas semuanya menunjukkan nilai VIF dibawah 10,0 yang berarti semua variabel eksogen terbebas dari masalah multikolinearitas. Hasil analisis pola pengaruh langsung maupun tidak langsung melalui pengujian hipotesis di wilayah barat dan timur (gambar 2).

Pada gambar 2 tampak bahwa pada wilayah barat, dana program berpengaruh secara nyata terhadap kemiskinan perdesaan (ditunjukkan oleh panah bercetak tebal) berada pada jalur pengaruh tidak langsung melalui produksi padi dan PDRB subsektor tanaman pangan dengan nilai sebesar 0,300.



Keterangan :
 Angka cetak miring = koefisien jalur
 = pola pengaruh nyata
 = pola pengaruh tidak nyata

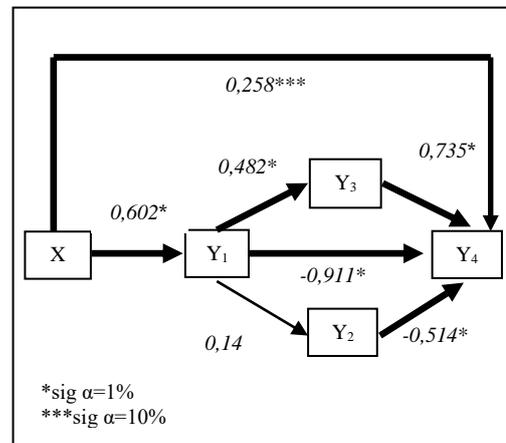
Gambar 2. Pola Pengaruh Peubah Diagram Jalur di Wilayah Barat Indonesia

Sedangkan gambar 3 menunjukkan tiga jalur pola pengaruh dana program terhadap kemiskinan perdesaan secara nyata di wilayah timur (ditunjukkan pula oleh panah bercetak tebal) baik secara langsung maupun tidak langsung. Jalur pengaruh langsung menunjukkan nilai 0,258, jalur pengaruh tidak langsung melalui produksi padi dan PDRB subsektor tanaman pangan menunjukkan koefisien sebesar 0,213. Namun dominasi variabel terbesar berada pada jalur pengaruh tidak langsung melalui produksi padi dengan koefisien tertinggi yaitu sebesar 0,548.

Gambaran Umum Obyek Penelitian

Program UPSUS Peningkatan Produksi Padi yang dilaksanakan pemerintah sejak tahun 2015 menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, produksi padi secara nasional meningkat sebesar 6,42% di tahun 2015 (tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir) dan sebesar 5,01% di tahun 2016. Rata-rata peningkatan produksi padi di wilayah barat sebesar 5,76%, dimana peningkatan tertinggi di provinsi Jambi yang mencapai 52,18%, sedangkan yang terendah di Kepulauan Riau dengan penurunan

produksi sebesar 32,95%. Walaupun Jambi merupakan provinsi dengan jumlah produksi yang jauh berada dibawah rata-rata produksi wilayah Barat, namun provinsi ini mampu menunjukkan prestasi yang patut mendapatkan apresiasi, dimana peningkatan produksinya mencapai lebih dari 50%. Di sisi lain Jawa Timur sebagai produsen padi terbesar nasional hanya mampu meningkatkan produksinya sebesar 2,93%, sedangkan Jawa Tengah sebagai produsen terbesar ketiga justru terjadi penurunan produksi sebesar 0,52%.



Keterangan :
 Angka cetak miring = koefisien jalur
 = pola pengaruh nyata
 = pola pengaruh tidak nyata

Gambar 3. Pola Pengaruh Peubah Diagram Jalur di Wilayah Timur Indonesia

Di wilayah timur, rata-rata peningkatan produksi padi lebih rendah dibandingkan wilayah barat yaitu sebesar 2,46% dan dari 17 (tujuh belas) provinsi yang dikelompokkan di wilayah timur, 7 (tujuh) diantaranya merupakan provinsi dengan peningkatan produksi padi di atas rata-rata wilayah. Papua merupakan provinsi dengan peningkatan produksi tertinggi sebesar 29,14% dan penurunan produksi tertinggi di wilayah timur terjadi di Kalimantan Utara yang mencapai 25,58%. Provinsi lain di wilayah timur yang menunjukkan prestasi yaitu Kalimantan Barat sebesar 15,51% dan Su-

lawesi Barat dengan peningkatan sebesar 19,79%. Kecuali Kalimantan Barat, provinsi di wilayah timur dengan peningkatan produksi tinggi justru bukan merupakan daerah potensi usahatani padi, namun daerah tersebut mampu menunjukkan prestasi membanggakan.

Pada sisi kemiskinan perdesaan, wilayah barat menunjukkan penurunan sebesar 0,04% dari prosentase kemiskinan perdesaan sebesar 11,88% tahun 2015 turun menjadi 11,84% pada tahun 2016. Kemiskinan perdesaan tertinggi wilayah barat pada tahun 2016 berada di provinsi Aceh yang mencapai 18,8% sedangkan yang terendah berada di Bali sebesar 5,21%. Riau merupakan provinsi di wilayah barat yang mampu menurunkan kemiskinan perdesaan paling besar yaitu sebesar 1,44%, sedangkan di Sumatera Barat kemiskinan perdesaan justru meningkat hingga mencapai 0,92% dibandingkan tahun 2015. Sementara itu penurunan kemiskinan perdesaan di wilayah timur menunjukkan angka yang lebih baik dibandingkan wilayah barat yaitu sebesar 0,26%. Kemiskinan perdesaan tertinggi pada tahun 2016 berada di Papua Barat sebesar 37,94% dan terendah berada di Kalimantan Selatan sebesar 5,37%. Provinsi dengan penurunan kemiskinan tertinggi berada di Sulawesi Utara yang turun mencapai 1,28%.

Alokasi dana program pada tahun 2015 di wilayah barat mendapatkan alokasi sebesar 55% dari total anggaran. Akan tetapi alokasi anggaran tersebut menurun di tahun 2016 dengan alokasi yang hanya sebesar 47%. Peningkatan alokasi anggaran yang melonjak tajam tampak di wilayah Timur Indonesia yang pada tahun 2015 mendapatkan porsi anggaran sebesar 45%, kemudian terjadi peningkatan alokasi anggaran di tahun 2016 hingga sebesar 53% dari total anggaran yang tersedia.

Pengaruh Langsung Dana UPSUS Peningkatan Produksi Padi terhadap Produksi Padi

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Dana UPSUS Peningkatan Produksi Padi terbukti berkontribusi positif bagi peningkatan produksi padi baik di wilayah barat maupun timur Indonesia. Hal ini tentu saja sejalan dengan tujuan program yang telah digulirkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian. Meningkatnya produksi padi, diharapkan dapat mewujudkan Indonesia yang swasembada beras, yang mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri bahkan mampu mengekspor beras di tahun-tahun mendatang. Selain itu, melalui peningkatan produksi padi diharapkan mampu meningkatkan pendapatan petani yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan terutama di perdesaan.

Dana program yang terbukti memiliki pengaruh terhadap produksi padi menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang pertanian sangat penting terhadap produksi pertanian. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan Adofu, Abula, & Agama (2012) yang menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk sektor pertanian memiliki hubungan positif dengan total produksi pertanian. Hasil serupa juga ditunjukkan Fan, Hazell, & Thorat (2000) dan Xu & Zhang (2011) dimana pengeluaran pemerintah di bidang pertanian berkontribusi menghasilkan pertumbuhan produktivitas pertanian yang lebih tinggi.

Hasil dari program yang secara nyata mampu mendongkrak produksi padi nasional merupakan langkah awal yang sangat tepat yang telah dilakukan pemerintah. Keseriusan pemerintah dalam menggenjot produksi pangan terutama padi didasarkan pada peran komoditas padi dalam kaitan langsungnya dengan fluktuasi harga. Hal inilah yang menjadikan padi merupa-

kan komoditas krusial yang harus dijaga suplainya, sehingga peningkatan produksi padi merupakan hal mendasak yang harus dilakukan pemerintah.

Pengaruh Langsung Produksi Padi terhadap Kesejahteraan Petani

Hasil analisis pengaruh produksi padi terhadap kesejahteraan petani menunjukkan hasil yang sama-sama tidak berpengaruh baik di wilayah barat maupun timur Indonesia. Kondisi ini berbeda dengan Jayadi (2012) yang menunjukkan peningkatan output sektor pertanian menyebabkan kesejahteraan petani menjadi lebih tinggi. Hal serupa juga telah dibuktikan Wahed (2015) yang menyimpulkan bahwa produksi usahatani berhubungan positif terhadap kesejahteraan petani yang diprosi melalui NTP.

Kondisi tidak adanya pengaruh produksi padi terhadap kesejahteraan petani baik di wilayah barat maupun timur dapat terjadi karena hal-hal berikut ini :

- 1) Ketika produksi padi tinggi, tanpa diikuti dengan penurunan biaya produksi tidak akan berpengaruh besar terhadap pendapatan petani. Menurut Susilowati & Maulana (2011), peningkatan efisiensi dengan penggunaan input produksi yang lebih rasional merupakan hal sangat penting dalam peningkatan produksi karena penekanan biaya produksi dapat meningkatkan pendapatan usahatani. Aplikasi pupuk berlebihan merupakan salah satu penyebab biaya produksi meningkat. Penggunaan urea misalnya, menurut Herman dalam Susila (2010) sebagian petani menggunakan sebanyak 400-600 kg/ha, padahal takaran anjuran hanya 200-250 kg/ha. Selain menyebabkan tidak efisiennya penggunaan input produksi, juga dapat menurunkan kualitas fisik, kimia, dan biologi tanah. Sementara itu Burhan, Suman, Pudjiharjo, & So-

etjipto (2011) menunjukkan bahwa petani tetap membeli pupuk meskipun terjadi peningkatan harga pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Kondisi tersebut tentu menyebabkan biaya produksi yang semakin meningkat sehingga pendapatan petani menurun dan tidak mampu mencapai kesejahteraannya.

- 2) Produksi tinggi tanpa diikuti rantai distribusi yang efektif belum mampu mendorong meningkatnya kesejahteraan petani. Semakin panjang rantai distribusi, maka semakin tinggi harga produk ketika sampai di tangan konsumen, sehingga harga pasar akan meningkat yang memacu inflasi. Inflasi menyebabkan pendapatan yang diterima petani lebih kecil dari pengeluarannya, sehingga kesejahteraan petani belum dapat dicapai. Jalur distribusi utama komoditas pertanian cenderung lebih panjang dengan melibatkan pedagang pengumpul/ tengkulak, pedagang besar, dan pedagang pengecer (Prastowo, Yanuarti, & Depari, 2008).
- 3) Panjangnya rantai distribusi menyebabkan peningkatan disparitas harga gabah dan beras. Menurut Prastowo, Yanuarti, & Depari (2008), dalam rantai distribusi distribusi produk pertanian, umumnya pedagang pengecer mendapatkan margin keuntungan terbesar, diikuti pedagang besar dan pedagang pengumpul. Disparitas harga yang lebar antara harga petani dan harga konsumen mengindikasikan bahwa nilai tambah pengolahan dan perdagangan beras tidak dinikmati petani dan konsumen. Kesenjangan harga yang semakin lebar menunjukkan bahwa harga yang diterima petani cenderung menurun, namun harga yang diterima pedagang justru meningkat sehingga petani tidak

mampu mencapai kesejahteraannya. Hal ini didukung Ponto, Kumenaung, & Wauran (2015) bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor pertanian dilakukan dengan meningkatkan harga yang diterima atas produk yang dihasilkan.

Pengaruh Langsung Produksi Padi terhadap PDRB Subsektor Tanaman Pangan

Produksi padi di kedua wilayah menunjukkan hasil yang sama, yaitu mampu membawa kecenderungan meningkatnya PDRB subsektor tanaman pangan. Peningkatan tersebut akibat meningkatnya volume produksi barang dan jasa pada subsektor tanaman pangan dalam perekonomian. Sebagai komoditas penghasil bahan pangan pokok masyarakat Indonesia, produksi padi dominan dibandingkan tanaman pangan lainnya. Sebanyak 62% produksi tanaman pangan di Indonesia merupakan produksi komoditas padi. Dengan tingkat produksi yang paling tinggi dibandingkan tanaman pangan lainnya, komoditas padi mampu berkontribusi dalam peningkatan PDRB subsektor tanaman pangan baik di wilayah barat maupun timur. Hasil penelitian sejalan dengan Oyakhilomen & Zibah (2014) dimana produksi pertanian memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang diproksi dari Produk Domestik Bruto.

Pengaruh Langsung Produksi Padi terhadap Kemiskinan Perdesaan

Studi yang pernah dilakukan Khan & Shah (2012) menunjukkan peningkatan produktivitas diiringi dengan peningkatan produksi pertanian dapat mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan sebagai akibat peningkatan produktivitas dan produksi pertanian. Menurut Tambunan (2009) pertumbuhan output (produktivitas) dan kenaikan tingkat upah merupakan jalur utama dimana kinerja pertanian dapat mempengaruhi kemiskinan.

Namun demikian hasil penelitian ini sedikit berbeda dengan penelitian terdahulu. Di wilayah timur, produksi padi berpengaruh nyata terhadap kemiskinan di perdesaan, dimana peningkatan produksi padi memiliki kecenderungan menurunnya kemiskinan perdesaan. Akan tetapi, di wilayah barat menampakkan hal yang berbeda, yaitu tidak tampaknya pengaruh produksi padi terhadap kemiskinan perdesaan.

Tidak adanya pengaruh produksi padi terhadap kemiskinan perdesaan di wilayah barat disebabkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Struktur perekonomian di wilayah barat mulai mengalami perubahan dimana sektor pertanian secara perlahan semakin menurun perannya dalam perekonomian. Hal ini tampak dari rasio tenaga kerja pada sektor pertanian. Meskipun tenaga kerja pada sektor pertanian masih dominan di wilayah barat (29,34%), namun bila dibandingkan dengan wilayah timur (42,01%), nilai rasionya jauh lebih kecil. Hal tersebut sebagai akibat meningkatnya jumlah penduduk yang sangat pesat, terutama di Jawa sehingga kebutuhan akan permukiman juga meningkat. Situasi ini menyebabkan tingginya lahan pertanian yang beralih fungsi kemudian memacu turunnya jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Penduduk yang memilih tetap bertahan di sektor pertanian terutama tanaman pangan pun hanya mampu bertahan hidup dari usahatani lahannya yang sempit sebagai akibat budaya waris lahan dengan pendapatan yang pas-pasan, sehingga peningkatan produksi padi di wilayah ini tidak berpengaruh terhadap kemiskinan perdesaan.
- 2) Peningkatan produksi padi tidak diikuti menurunnya harga beras.

Hal ini tampak pada saat panen raya yang biasanya terjadi pada bulan Maret, tidak mendorong menurunnya harga beras, sedangkan harga gabah di tingkat petani justru mengalami penurunan. Berdasarkan data BPS, peningkatan kesenjangan (disparitas) harga di tingkat petani dan di tingkat pedagang besar menunjukkan angka tertinggi pada bulan Maret, dimana peningkatan kesenjangan yang paling tinggi sebesar 11,02% pada Maret 2015 dan 7,01% pada Maret 2016. Semakin tinggi peningkatannya mengindikasikan bahwa peningkatan harga tidak diikuti peningkatan pendapatan petani, sehingga produksi yang meningkat tidak berpengaruh terhadap kemiskinan perdesaan.

Sementara itu pembangunan yang ada di wilayah timur tidak sepesat wilayah barat. Meskipun jumlah penduduk yang bekerja di bidang pertanian lebih kecil dibandingkan wilayah barat, namun struktur perekonomian wilayah ini masih bertumpu pada sektor pertanian yang dibuktikan dengan dominasi rasio tenaga kerja pada sektor pertanian yang lebih dari 40%. Hal tersebut menunjukkan hampir setengah dari tenaga kerja di wilayah ini menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Dukungan lahan pertanian yang masih luas, peranan sektor industri pengolahan masih tergolong kecil dan belum berkembang pesat di wilayah ini sehingga peran dominan pada sektor pertanian menyebabkan kondisi dimana ketika produksi padi meningkat, hal tersebut mampu memacu menurunnya kemiskinan perdesaan di wilayah ini.

Pengaruh Langsung Dana UPSUS Peningkatan Produksi Padi terhadap Kemiskinan Perdesaan

Anggaran UPSUS Peningkatan Produksi Padi tidak berpengaruh nyata terhadap kemiskinan perdesaan di wi-

layah barat mengindikasikan dana program belum mampu menjadi stimulus dalam menurunkan tingkat kemiskinan perdesaan di wilayah barat. Hal tersebut disebabkan anggaran program masih sangat kecil. Pada tahun 2015 anggaran program yang dikeluarkan pemerintah hanya 0,93% dari PDRB subsektor tanaman pangan wilayah ini, yang kemudian meningkat menjadi 1,93% pada 2016. Di sisi lain dengan tingkat kemiskinan perdesaan di wilayah barat yang berada di kisaran 11% memerlukan usaha ekstra keras dan anggaran yang tidak sedikit untuk mengatasi kemiskinan perdesaan di wilayah barat. Meskipun anggaran program belum mampu berpengaruh terhadap kemiskinan perdesaan, namun perhatian pemerintah pada sektor pertanian utamanya komoditas padi sangat besar yang ditunjukkan melalui peningkatan anggaran untuk program ini yang telah ditingkatkan hingga 116% pada tahun 2016.

Sementara dana program di wilayah timur menunjukkan pengaruh secara langsung terhadap tingkat kemiskinan perdesaan, namun hubungannya positif, yang mengindikasikan bahwa peningkatan dana program memacu peningkatan kemiskinan perdesaan. Hal ini tidak sejalan dengan hasil studi Udofia & Essang (2015) maupun Labintan (2010) yang menunjukkan pengeluaran di sektor pertanian akan meningkatkan output pertanian dan pada gilirannya akan mengurangi kemiskinan.

Meskipun anggaran program di wilayah timur mengalami peningkatan yang sangat besar, yaitu 2,63% dari PDRB subsektor tanaman pangan pada tahun 2015 kemudian meningkat menjadi 7,66% di tahun 2016, namun pengaruhnya justru meningkatkan kemiskinan perdesaan. Situasi ini menunjukkan fakta belum adanya keberpihakan pemerintah terhadap petani yang terlihat dari rendahnya Harga

Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan beras yang ditetapkan pemerintah dibandingkan harga pasar. Terjadi kecenderungan petani dipacu untuk mampu meningkatkan produksi padinya dalam menopang kebutuhan beras nasional, namun di sisi lain harga jual masih dibiarkan rendah. HPP hanya melindungi petani agar harga tidak semakin merosot pada saat harga pasar rendah, namun belum mampu meningkatkan kesejahteraan petani sehingga kemiskinan masih cenderung tinggi.

Tabel 3. Perbandingan Harga GKP, GKG dan Beras di tingkat Petani, Penggilingan dan Bulog

Uraian	Harga (Rp)	
	2015	2016
GKP tingk. petani	4.694	4.617
HPP GKP Bulog	3.700	3.700
GKG tingk. penggilingan	5.377	5.566
HPP GKG Bulog	4.600	4.600
Beras tingk. penggilingan	9.059	9.107
HPP Beras Bulog	7.300	7.300

Ket : - harga rata-rata
 - GKP (Gabah Kering Panen)
 - GKG (Gabah Kering Giling)

Sumber : BPS (diolah)

Bulog yang berperan menyerap gabah produksi petani hanya mampu membeli sesuai HPP yang telah ditetapkan padahal harga gabah di pasaran jauh berada di atas harga HPP (seperti tampak pada tabel 3). Hal ini menyebabkan petani enggan menjual gabahnya ke Bulog. Selain rendahnya harga, rumitnya prosedur serapan gabah oleh Bulog juga mendorong petani lebih memilih menjual hasil panennya ke tengkulak (Arjayanti, 2010).

Pengaruh Langsung Kesejahteraan Petani terhadap Kemiskinan Perdesaan

NTP sebagai proksi kesejahteraan petani dan hubungan dengan kemiskinan perdesaan menunjukkan situasi yang berbeda pada kedua wilayah. Di wilayah barat, kesejahteraan petani tidak menampakkan pengaruhnya terhadap kemiskinan perdesaan. Sedangkan di wilayah timur menun-

jukkan hal sebaliknya, dimana meningkatnya kesejahteraan petani menyebabkan kecenderungan menurunnya tingkat kemiskinan perdesaan. Belum nampaknya pengaruh kesejahteraan petani terhadap kemiskinan perdesaan di wilayah barat disebabkan NTP tidak dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan dalam jangka pendek. Kondisi ini disebabkan wilayah barat merupakan wilayah yang mulai mengalami pergeseran struktur perekonomian. Secara perlahan namun pasti, sektor pertanian yang dulu merupakan tulang punggung perekonomian, saat ini mulai tergeser dan digantikan sektor industri. Hal ini sejalan dengan temuan Jayadi (2012) yang menunjukkan bahwa pada provinsi dengan basis non pertanian terbukti bahwa indeks NTP tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan dalam jangka pendek.

Menurunnya peran sektor pertanian di wilayah barat sebagai akibat pesatnya pembangunan ditambah dengan peningkatan penduduk dalam jumlah besar, menyebabkan lahan pertanian semakin menurun dan beralih fungsi. Banyak pemilik lahan yang terpaksa menjual lahannya karena kebutuhan ekonomi, dan kemudian beralih bekerja pada sektor industri, yang diyakini mampu meningkatkan taraf hidupnya. Hal tersebut didukung data BPS yang menunjukkan bahwa di wilayah barat pada 2013 rumah tangga yang menjual lahannya dengan kebutuhan ekonomi sebagai alasan utamanya tercatat sebanyak 66%.

Semakin menurunnya kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian menyebabkan penduduk miskin perdesaan sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Penduduk yang tetap bertahan di sektor pertanian terutama di perdesaan semakin terdesak. Mereka tidak mampu beralih pekerjaan karena keterbatasan pendidikan dan ketrampilan. Ketrampilan yang mereka miliki hanya ketrampilan pada sektor perta-

nian, sehingga mau tidak mau mereka tetap bertahan hidup dari hasil mata pencaharian di bidang pertanian yang menggantungkan hidupnya dari hasil usahatani. Bagi yang tidak memiliki lahan, mereka harus puas dengan pendapatan sebagai buruh tani dengan upah sangat minim. Minimnya upah yang mereka terima tampak dari pendapatan buruh pada sektor pertanian yang jauh lebih kecil dibandingkan sektor lain. Sensus pertanian BPS 2013 menunjukkan total pendapatan pekerja sektor pertanian dalam setahun hanya 40% dari total pendapatan yang diterima pekerja di luar sektor pertanian.

Pengaruh Langsung PDRB Subsektor Tanaman Pangan terhadap Kemiskinan Perdesaan

Pengaruh PDRB subsektor tanaman pangan menunjukkan pengaruh nyata terhadap kemiskinan perdesaan baik di wilayah barat maupun timur, namun hasilnya menunjukkan hubungan yang positif antara kedua variabel tersebut. Hal ini bertentangan dengan Tambunan (2009) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan output di sektor pertanian berdampak lebih besar pada perubahan kemiskinan bila dibandingkan dengan sektor manufaktur. Hal serupa juga ditunjukkan Suryahadi, Suryadarma, & Sumarto (2006) bahwa pertumbuhan sektor pertanian perdesaan dapat mengurangi kemiskinan di kalangan penduduk yang bekerja di sektor pertanian perdesaan, sehingga sangat diperlukan percepatan pertumbuhan pada sektor tersebut. Ponto, Kumenaung, & Wauran, (2015) menunjukkan bahwa PDB pertanian berkontribusi dominan terhadap pengentasan kemiskinan.

Meningkatnya PDRB subsektor tanaman pangan yang justru memiliki kecenderungan meningkatkan kemiskinan perdesaan menunjukkan bahwa nilai tambah produk pertanian tidak dinikmati oleh petani. Hal tersebut se-

jalan dengan Harsono (2009) yang menyatakan bahwa kemiskinan yang dialami petani disebabkan ketidakmampuan petani untuk memperoleh nilai tambah atas produk yang dihasilkannya, karena nilai tambah dari pertanian diambil pengusaha dan dunia industri. Petani yang menjual hasil panen secara langsung di sawah, tidak dapat ikut menikmati nilai tambah yang dihasilkan dari perdagangan gabah dan beras (Sobichin, 2012). Hal tersebut didukung. Supriatna (2003) menunjukkan bahwa 95% petani di Sumatera Utara menjual langsung gabah setelah panen dalam bentuk gabah kering panen (GKP), dan sisanya menjual setelah penyimpanan dalam bentuk gabah kering simpan (GKS). Hal serupa ditunjukkan Masniadi, Suman, & Sasongko (2012) bahwa pada umumnya hasil panen petani langsung dibeli oleh pembeli dengan langsung menjemput ke sawah petani.

Pada sektor pertanian, jumlah pekerja yang tidak dibayar juga menunjukkan kontribusi yang tinggi bila dibandingkan sektor lainnya. Pada tahun 2016, data BPS menunjukkan bahwa sekitar 40% tenaga kerja pada sektor pertanian merupakan pekerja yang tidak dibayar. Dengan kondisi seperti itu, dapat dipastikan adanya peningkatan PDRB tidak dapat dinikmati masyarakat perdesaan yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, terutama bagi mereka yang berperan sebagai tenaga kerja yang tidak dibayar, karena berapapun tingkat barang dan jasa yang dihasilkan, mereka tidak menerima penghasilan sebagai hasil jerih payahnya.

Pengaruh Tidak Langsung Dana UPSUS Peningkatan Produksi Padi terhadap Kemiskinan Perdesaan melalui Produksi Padi

Produksi padi dalam penelitian ini berperan sebagai perantara untuk melihat kontribusi dana program terhadap tingkat kemiskinan perdesaan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dana program berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan perdesaan di wilayah timur. Berbeda dengan wilayah timur, ternyata penelitian menunjukkan hasil bahwa di wilayah barat, dana program tidak memiliki pengaruh terhadap penurunan kemiskinan perdesaan meskipun dana program berpengaruh secara positif terhadap produksi padi.

Hal ini mengindikasikan bahwa di wilayah barat, dana program melalui media perantara produksi padi belum mampu berperan sebagai faktor yang dapat menurunkan kemiskinan. Fakta tersebut disebabkan struktur perekonomian di wilayah barat mulai mengalami perubahan dimana sektor pertanian secara perlahan semakin menurun perannya dalam perekonomian. Peningkatan penduduk yang pesat, terutama di Jawa menyebabkan tingginya lahan pertanian yang beralih fungsi kemudian memacu turunnya jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Penduduk yang memilih tetap bertahan di sektor pertanian hidup dengan pendapatan yang pas-pasan karena sempitnya lahan yang mereka miliki dan menyebabkan peningkatan produksi padi di wilayah ini tidak berpengaruh terhadap kemiskinan perdesaan.

Sementara itu, peningkatan dana program di wilayah timur menyebabkan kecenderungan terjadinya peningkatan produksi padi yang kemudian memberikan pengaruh juga terhadap menurunnya tingkat kemiskinan perdesaan. Hal ini mengindikasikan bahwa dana program tidak serta merta mampu mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan di perdesaan, namun harus melalui produksi padi sebagai media perantaranya. Artinya pengeluaran pemerintah melalui program ini, mampu mendorong produksi padi wilayah timur, kemudian dengan meningkatnya produksi padi terbukti

mampu mengurangi tingkat kemiskinan perdesaan di wilayah ini. Meskipun wilayah timur bukan merupakan lumbung padi nasional, namun wilayah ini mampu menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan wilayah barat. Perekonomian di wilayah timur yang masih bertumpu pada sektor pertanian yang dibuktikan dari tenaga kerja sektor pertanian yang memiliki rasio sebesar 42% jauh lebih besar bila dibandingkan wilayah barat yang hanya sebesar 29%. Hal inilah yang menyebabkan dana program berpengaruh terhadap peningkatan produksi padi dan mampu menurunkan tingkat kemiskinan perdesaan di wilayah timur.

Pengaruh Tidak Langsung Dana UPSUS Peningkatan Produksi Padi terhadap Kemiskinan Perdesaan melalui Produksi Padi dan Kesejahteraan Petani

Pengaruh dana program terhadap kemiskinan perdesaan melalui produksi dan kesejahteraan petani tidak terbukti nyata baik di wilayah barat maupun timur Indonesia. Produksi padi yang meningkat, belum mampu mempengaruhi kesejahteraan petani. Kesejahteraan petani belum mampu meningkat hanya dari peningkatan produksi pertanian yang mereka hasilkan, namun faktor harga produk yang dijual petani juga ikut menentukan. Peningkatan produksi menyebabkan harga produk pertanian turun yang berakibat pula pada turunnya pendapatan yang diterima petani. Hal ini menjadi penyebab belum tercapainya kesejahteraan petani. Untuk itu, perlu peran pemerintah melalui mekanisme harga, karena tanpa adanya campur tangan pemerintah, pembentukan harga komoditas pertanian ditentukan oleh mekanisme pasar yang sebenarnya telah terdistorsi. Harga yang rendah menyebabkan surplus konsumen lebih besar dibandingkan surplus produsen yang diterima petani. Dengan

karakter produk pertanian yang bersifat *perishable* (mudah rusak) ditambah pola distribusi yang panjang, maka akan sangat mustahil didapatkan harga yang terjangkau tanpa mengorbankan petani sebagai produsennya.

Tidak nampaknya pengaruh kesejahteraan petani terhadap kemiskinan perdesaan menunjukkan bahwa NTP belum dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan dalam jangka pendek, terutama pada wilayah dengan perekonomian yang bertumpu pada sektor non pertanian seperti halnya di wilayah barat. Hal ini sejalan dengan hasil temuan Jayadi (2012) yang menyatakan bahwa pada wilayah dengan basis non pertanian, NTP sebagai proksi kesejahteraan petani tidak dapat mempengaruhi kemiskinan dalam jangka pendek. Namun pada wilayah timur, di mana perekonomiannya masih bertumpu pada sektor pertanian, tampak bahwa kesejahteraan petani mampu memacu penurunan kemiskinan perdesaan.

Pengaruh Tidak Langsung Dana UPSUS Peningkatan Produksi Padi terhadap Kemiskinan Perdesaan melalui Produksi Padi dan PDRB Subsektor Tanaman Pangan

Dana program terbukti berpengaruh terhadap kemiskinan perdesaan melalui produksi padi dan PDRB subsektor tanaman pangan baik di wilayah barat maupun timur. Pengaruh dana program terhadap produksi padi, pengaruh produksi padi terhadap PDRB subsektor tanaman pangan serta pengaruh PDRB subsektor tanaman pangan terhadap kemiskinan perdesaan semuanya menunjukkan koefisien positif. Dari ketiga pengaruh tersebut, hanya pengaruh PDRB subsektor tanaman pangan yang tidak sesuai teori dan hasil penelitian terdahulu. Secara ideal, meningkatnya PDRB subsektor tanaman pangan seharusnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan di perdesaan. Situasi ini menunjukkan bah-

wa petani belum dapat memberikan nilai tambah atas produk yang dihasilkan. Nilai tambah terbesar pada produk pertanian berada pada proses pasca panen yang ironisnya kedua kegiatan tersebut justru tidak mampu dilakukan petani sehingga proses tersebut seringkali dilakukan oleh pihak lain. Hal ini menyebabkan petani bukanlah pihak yang menikmati peningkatan PDRB sebagai akibat meningkatnya nilai tambah yang dihasilkan dan peningkatan PDRB justru memacu peningkatan kemiskinan perdesaan. Kondisi tersebut didukung hasil studi Supriatna (2003) yang menunjukkan bahwa 95% petani di Sumatera Utara menjual langsung gabah setelah panen dalam bentuk Gabah Kering Panen (GKP), dan sisanya menjual setelah penyimpanan dalam bentuk Gabah Kering Simpan (GKS) karena petani tidak mempunyai sarana pengeringan dan penyimpanan yang memadai.

5. KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN, DAN BATASAN

Implikasi hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa di wilayah barat, peran pemerintah dalam menurunkan kemiskinan perdesaan melalui pengeluarannya perlu lebih difokuskan untuk meningkatkan produksi padi dan PDRB subsektor pertanian. Produksi padi di wilayah ini dapat ditingkatkan lagi melalui pengembangan inovasi teknologi namun perlu memperhatikan aspek kelestarian lingkungan melalui penggunaan bahan kimia secara bijaksana sehingga tidak menurunkan kualitas fisik, kimia, dan biologi tanah. Untuk itu peran penyuluh sangat penting dalam proses transfer inovasi teknologi yang mampu mengubah perilaku petani dalam kegiatan usahatani.

Dalam hal peningkatan PDRB subsektor pertanian, pemerintah perlu mendorong penguasaan nilai tambah produk sehingga petani dapat melaku-

kan proses pasca panen dan mampu menjual produknya dalam bentuk GKS atau bahkan beras. Nilai tambah yang dihasilkan petani akan mendorong peningkatan pendapatan yang kemudian mampu menurunkan tingkat kemiskinan perdesaan. Untuk itu peran pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk bantuan sarana pengeringan maupun penyimpanan yang diberikan melalui kelompok tani dan kemudian didukung peningkatan pengetahuan petani tentang proses pasca panen yang tepat untuk meminimalkan kehilangan hasil.

Sementara itu pada wilayah timur, pengeluaran pemerintah di bidang pertanian perlu lebih diutamakan untuk meningkatkan produksi padi. Dengan dukungan lahan pertanian masih banyak tersedia, wilayah timur masih memiliki potensi besar untuk dapat meningkatkan produksi padinya. Wilayah daratan yang masih luas dan produktif menjadikan wilayah ini memiliki peluang besar menjadi tumpuan harapan sektor pertanian nasional. Potensi Sumber Daya Alam (SDA) di wilayah timur belum dikembangkan secara optimal, padahal potensi tersebut merupakan potensi yang sangat besar. Untuk itu, perlu dilakukan pembenahan infrastruktur lebih dulu seperti jalan usahatani dan jaringan irigasi, karena faktor ini memegang peranan penting dalam meningkatkan produksi pertanian. Selain itu pengembangan inovasi teknologi mutlak diperlukan dalam meningkatkan produktivitas dan menekan biaya produksi.

Pengaruh langsung dana program terhadap kemiskinan secara nyata terjadi di wilayah timur, sedangkan di wilayah barat dana program tidak terbukti berpengaruh terhadap kemiskinan perdesaan. Namun demikian pengaruh langsung di wilayah timur menunjukkan koefisien positif yang artinya peningkatan dana program

memiliki kecenderungan meningkatkan kemiskinan di perdesaan.

Pengaruh tidak langsung dana program terhadap kemiskinan perdesaan di wilayah barat dan timur memiliki pola yang sedikit berbeda. Di wilayah barat dana program berpengaruh tidak langsung terhadap kemiskinan perdesaan melalui produksi padi dan PDRB subsektor tanaman pangan. Sementara itu di wilayah Timur, pengaruh tidak langsungnya memiliki dua pola yaitu pengaruh tidak langsung melalui produksi padi; dan pengaruh tidak langsung melalui produksi padi dan PDRB subsektor tanaman pangan. Pengaruh tidak langsung melalui produksi padi dan PDRB subsektor tanaman pangan baik di wilayah barat maupun timur, menunjukkan nilai positif, hal ini juga berbeda dengan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa PDRB pertanian berkontribusi dominan terhadap pengentasan kemiskinan.

Program pemerintah dalam bidang pertanian, hendaknya tidak hanya memprioritaskan peningkatan produksi namun lebih kepada bagaimana program tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan petani, dimana petani merupakan subyek yang kehidupannya masih sangat memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Adanya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan petani menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kehidupan petani sebagai pihak yang berperan penting dalam menjaga kestabilan ketersediaan beras nasional. Dalam meningkatkan kesejahteraan petani, yang tidak kalah penting adalah membangun kapasitas sumberdaya manusia pada masyarakatnya secara komprehensif dan penciptaan nilai tambah atas produk pertanian yang dihasilkan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, sehingga kedepannya perlu dilakukan pengembangan pada penelitian berikutnya, yaitu pelaksanaan

UPSUS Peningkatan Produksi Padi sebagai bagian dari program UPSUS Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai (PAJALE) baru dimulai tahun 2015 dan akan selesai pada 2017. Namun karena belum tersedianya data 2017 maka periode tahun yang digunakan dalam penelitian hanya 2015 dan 2016, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan periode tahun pelaksanaan program secara penuh dari tahun 2015 hingga tahun 2017 untuk dapat melihat pengaruh program ini terhadap kemiskinan perdesaan secara riil.

DAFTAR PUSTAKA

- Adofu, I., Abula, M., & Agama, J. (2012). The Effects of Government Budgetary Allocation to Agricultural Output in Nigeria. *Sky Journal of Agricultural Research*, 1(1), 1–5.
- Arjayanti, S. (2010). Analisis Kebijakan Stabilisasi Harga Gabah/Beras di Tingkat Petani di Propinsi DIY. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 15(2), 17–34.
- Burhan, M., Suman, A., Pudjiharjo, M., & Soetjipto, N. (2011). Analisis Ekonomi terhadap Struktur, Perilaku dan Kinerja Pasar Pupuk di Jawa Timur (Kasus di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Ngawi). *Journal of Indonesian Applied Economics*, 5(1), 68–92.
- Fan, S., Hazell, P., & Thorat, S. (2000). Impact of Public Expenditure on Poverty in Rural India. *Economic and Political Weekly*, 35(40), 3581–3588.
- Fan, S., Jitsuchon, S., & Methakunnavut, N. (2004). *The Importance of Public Investment for Reducing Rural Poverty in Middle-Income Countries: The Case Study of Thailand*. DSGD Discussion Paper NO . 7. Washington D.C. Retrieved from <http://www.ifpri.org/publication/importance-public-investment-reducing-rural-poverty-middle-income-countries>
- Gudono. (2012). *Analisis Data Multivariat*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Harsono, D. (2009). Pembangunan Pertanian yang Berpihak pada Petani. *Jurnal Informasi*, 2(XXXV), 83–92.
- Jayadi. (2012). *The Dynamic Analysis of Inflation Rate and Farmers ' Welfare for Rural Poverty Reduction in Indonesia* (Institute of Social Studies). Hague, Netherlands.
- Khan, H., & Shah, M. (2012). Irrigation, Farm Productivity and Poverty Reduction in KPK Understanding Direct and Indirect Impacts and Linkages. *2nd Annual International Conference on Qualitative and Quantitative Economics Research (QQE 2012)*, 23–27.
- Labintan, A. C. (2010). *Evaluation of The Necessary of Agriculture Public Expenditure for Poverty Reduction and Food Security in Benin* (Agriculture And Sustainable Development Zhongnan University Of Economic And Law). Wuhan.
- Masniadi, R., Suman, A., & Sasongko. (2012). Analisis Komoditas Unggulan Pertanian untuk Pengembangan Ekonomi Daerah Tertinggal di Kabupaten Sumbawa Barat. *Ekonomika-Bisnis*, 3(1), 51–64.
- Mubyarto. (1983). *Strategi dan Pembangunan Pedesaan*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada.
- Omari, L. V., & Muturi, W. (2016).

- The Effect of Government Sectoral Expenditure on Poverty Level in Kenya. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 7(8), 219–242.
- Oyakhilomen, O., & Zibah, R. G. (2014). Agricultural Production and Economic Growth in Nigeria Implication for Rural Poverty Alleviation. *Quarterly Journal of International Agriculture*, 53(3), 207–223.
- Ponto, S. O., Kumenaung, A., & Wauran, P. (2015). Analisis Korelasi Sektor Pertanian Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol 15(No. 4), 137-147.
- Prastowo, N., Yanuarti, T., & Depari, Y. (2008). *Pengaruh Distribusi dalam Pembentukan Harga Komoditas dan Implikasinya terhadap Inflasi* (Bank Indonesia). Jakarta.
- Pratomo, D. S., Saputra, P. M., & Shofwan. (2015). Does Minimum Wage Policy Help poor Workers? Evidence from Indonesia. *Journal of Applied Economic Sciences*, X(8(38)), 1199–1204.
- Riduwan, & Kuncoro, E. . (2014). *Cara Menggunakan dan Memaknai Path Analysis (Analisis Jalur)* (Keenam). Bandung: Alfabeta.
- Saputra, P. M. (2014). Technical Efficiency and Export Performance Evidence for Self-selection Hypothesis From Indonesian Manufacturing Sector-level Data. *International Journal of Economic Policy in Emerging Economies*, 74(4), 383–398.
- Sarwono, J. (2012). *Path Analysis Untuk Riset Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Penerbit Elex Media Komputindo Kompas Gramedia.
- Sobichin, M. (2012). Nilai Rantai Distribusi Komoditas Gabah dan Beras di Kabupaten Batang. *Economics Development Analysis Journal*, 1(2), 1–9.
- Suman, A., & Yustika, A. . (1996). *Peta Bumi Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Lembaga Demografi FE-UI.
- Supriatna, A. (2003). *Analisis Sistem Pemasaran Gabah/Beras (Studi Kasus Petani Padi di Sumatra Utara)* (Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian). Bogor.
- Suryahadi, A., Suryadarma, D., & Sumarto, S. (2006). *Economic Growth and Poverty Reduction in Indonesia: The Effects of Location and Sectoral Components of Growth*. SMERU Research Institute.
- Susila, W. R. (2010). Kebijakan Subsidi Pupuk: Ditinjau Kembali. *Jurnal Litbang Pertanian*, 29(2), 43–49.
- Susilowati, S., & Maulana, M. (2011). *Analisis Usahatani dan Kesejahteraan Petani Padi, Jagung dan Kedele* (Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian). Bogor.
- Tambunan, T. (2009). The Assessment of the Importance of Agricultural Growth for Poverty Reduction in Indonesia. *Seoul Journal of Economics*, 22(3), 341–373.
- Timmer, C. P. (2004). *The Road to Pro-Poor Growth: The Indonesian Experience in Regional Perspective* (Center for Global Development). *Center for Global Development Working Paper #38*.
- Todaro, M. ., & Smith, S. . (2011). *Pembangunan Ekonomi Jilid 1*. (A. Maulana & N. . Sallama, Eds.) (Edisi 11). Jakarta: Erlangga.
- Udofia, L., & Essang, N. (2015). Agricultural Expenditure and

- Poverty Alleviation in Nigeria.
European Journal of Business and Management, 7(21), 29–45.
- Wahed, M. (2015). Pengaruh Luas Lahan , Produksi , Ketahanan Pangan dan Harga Gabah terhadap Kesejahteraan Petani Padi di Kabupaten Pasuruan.
JESP, 7(1), 68–74.
- Xu, S., & Zhang, Y. (2011). Impacts of Agricultural Public Spending on Chinese Food Economy: A General Equilibrium Approach. *China Agricultural Economic Review*, Vol. 3(4).